

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pembangunan ekonomi dilaksanakan secara terpadu, selaras, seimbang dan berkelanjutan dan diarahkan agar pembangunan yang berlangsung merupakan kesatuan pembangunan nasional. Pembangunan ekonomi menurut Adam Smith, pembangunan ekonomi merupakan proses perpaduan antara pertumbuhan penduduk dan kemajuan teknologi (Suryana, 2000). Todaro (dalam Lepi T. Tarmidi, 1992) mengartikan pembangunan sebagai suatu proses multidimensional yang menyangkut perubahan-perubahan besar dalam struktur sosial, sikap masyarakat, kelembagaan nasional maupun percepatan pertumbuhan ekonomi, pengurangan ketidakerataan dan penghapusan dari kemiskinan mutlak. Pembangunan ekonomi bukan merupakan proses yang harmonis atau gradual, tetapi merupakan perubahan yang spontan dan tidak terputus-putus. Pembangunan ekonomi disebabkan oleh perubahan terutama dalam bidang industri dan perdagangan hal tersebut berkaitan dengan pendapatan perkapita dan pendapatan nasional.

Salah satu indikator keberhasilan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat dapat dilihat melalui tingkat pertumbuhan ekonominya. Menurut Sadono Sukirno (1996) ialah proses kenaikan output perkapita yang terus menerus dalam jangka panjang. Dengan demikian makin tinggi pertumbuhan ekonomi suatu negara maka semakin tinggi pula kesejahteraan masyarakatnya dan dapat dikatakan pembangunan

ekonominya berhasil, meskipun terdapat beberapa indikator lain yaitu distribusi pendapatan.

Pertumbuhan ekonomi menurut Boediono (1994) suatu proses pertumbuhan output perkapita jangka panjang yang terjadi apabila ada kecenderungan (output perkapita untuk naik) yang bersumber dari proses intern perekonomian tersebut (kekuatan yang berada dalam perekonomian itu sendiri), bukan berasal dari luar dan bersifat sementara. Atau dengan kata lain bersifat self generating, yang berarti bahwa proses pertumbuhan itu sendiri menghasilkan suatu kekuatan atau momentum bagi kelanjutan pertumbuhan tersebut dalam periode-periode selanjutnya.

Tujuan dari usaha pembangunan ekonomi tidak hanya merupakan program dari pemerintah pusat tapi juga pemerintah daerah sedangkan pengertian pembangunan ekonomi dalam lingkup daerah yaitu suatu proses pemerintah daerah dan masyarakat mengelola sumberdaya-sumberdaya yang ada dengan menjalin pola-pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan pihak swasta guna penciptaan lapangan kerja serta dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut (Arsyad, 2002). Oleh karena itu, kebijakan pembangunan ekonomi daerah dilakukan guna mencapai pertumbuhan ekonomi daerah yang tinggi dengan mengelola potensi sumber daya yang ada di masing-masing daerah (Dhyatmika, 2013)

Upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah tentu tidak terlepas dari permasalahan kesenjangan antar wilayah di suatu daerah.

Artinya, pertumbuhan ekonomi daerah yang tinggi belum tentu dapat mengatasi permasalahan yang ada pada suatu wilayah. Seperti yang dijelaskan Kuncoro (2002) yang relevan dengan kondisi di suatu daerah bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan syarat tetapi tidak mencukupi bagi proses pembangunan. Bahkan Arsyad (2010) menyebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi hanya sedikit manfaatnya dalam memecahkan masalah kemiskinan, pengangguran dan distribusi yang timpang. Proses pertumbuhan ekonomi daerah seharusnya tidak lagi hanya memfokuskan pada upaya peningkatan pendapatan daerah melainkan kualitas dari pertumbuhan ekonomi daerah tersebut. Kualitas pertumbuhan ekonomi daerah erat kaitannya dengan berkurangnya tingkat kesenjangan antar daerah ekonomi maju dan daerah ekonomi terbelakang. Ketimpangan ini disebabkan oleh perbedaan sumber daya yang dimiliki setiap daerah dengan daerah yang lain (Glasson, 1990). Maka dari itu, kebutuhan yang dibutuhkan masing-masing daerah untuk mencapai proses pertumbuhan ekonomi yang berkualitas juga akan berbeda.

Upaya pemerintah pusat dalam mendorong kenaikan pertumbuhan ekonomi di daerah melalui peraturan perundang-undangan (Kuncoro, 2011). Undang-undang tersebut UU NO 32 Tahun 2004 Pasal 1 Ayat 5 tentang otonomi daerah. Menurut Vincent Lemius, otonomi daerah adalah suatu kebebasan atau kewenangan dalam membuat suatu keputusan politik maupun administrasi yang sesuai dengan yang ada didalam peraturan perundang-undangan, didalam suatu otonomi daerah terdapat sebuah

kewenangan yang dimiliki oleh suatu pemerintah daerah dalam menentukan apa yang menjadi suatu kebutuhan daerahnya namun kebutuhan daerah yang lain masih harus disesuaikan dengan kepentingan nasional sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Hal ini bertujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran masyarakat serta peningkatan daya saing daerah dengan memperlihatkan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kabupaten Bangkalan merupakan salah satu kabupaten yang melaksanakan otonomi daerah tersebut. Dengan adanya otonomi daerah, diharapkan masyarakat Bangkalan bisa merasa lebih baik karena dapat mengatur sendiri urusan di daerahnya. Dalam hal ini masyarakat dan Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan sendirilah yang tahu apa yang menjadi kekuatan dan kelemahan Kabupaten Bangkalan, sehingga perumusan perencanaan pembangunan termasuk pembangunan di bidang pertanian dapat disesuaikan dengan kekuatan dan kelemahan tersebut serta ketersediaan sumber daya. Kemudian dengan mengalokasikan sumber daya dan dana yang terbatas dapat diperoleh output yang optimal, yang pada akhirnya akan memberikan dampak positif terhadap kondisi perekonomian dan pembangunan wilayah.

Permasalahan yang biasanya terjadi pada daerah-daerah yang memiliki tingkat ekonomi lemah yaitu rendahnya kesadaran sumber daya manusianya dalam menggali potensi sumber daya alam yang terdapat di daerah tersebut, sehingga proses pembangunan ekonominya jadi terhambat. Apabila akan mencapai perubahan ekonomi yang lebih baik, setiap daerah harus benar-benar mengetahui potensi sumber daya alam yang terdapat di daerah tersebut dan mampu mengolah secara optimal sumber daya tersebut.

Salah satu contoh daerah yang memiliki tingkat ekonomi lemah di Jawa Timur adalah Kabupaten Bangkalan. Kabupaten Bangkalan merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Timur yang memiliki tingkat pertumbuhan kedua paling rendah setelah Kabupaten Sampang. Hal ini dikarenakan Indeks Pembangunan Manusia kabupaten bangkalan tidak pernah mengalami kenaikan drastis setiap tahunnya apabila dilihat dalam aspek pertumbuhan ekonominya.

Hal tersebut diperkuat dengan adanya Peraturan Presiden (perpres) Nomor 131/2015 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2015-2019. Bahwa Kabupaten Bangkalan adalah kabupaten yang berada di kuadran empat yaitu daerah tertinggal ketiga setelah Kabupaten Situbondo dan Kabupaten Bondowoso. Sedangkan Kota Surabaya dan Kabupaten Gresik merupakan daerah yang berada di kuadran satu yaitu daerah maju dan tumbuh pesat.

Kabupaten Bangkalan merupakan daerah yang memiliki banyak potensi yang merupakan komoditas di daerah tersebut. Apabila dilihat dari komoditas unggulannya, Kabupaten Bangkalan merupakan kabupaten yang perekonomiannya ditopang oleh sektor pertanian, hortikultura dan peternakan. Produk unggulan sektor pertanian yaitu padi dan jagung, sedangkan sektor hortikultura ada jambu biji, alpukat, belimbing, jambu air, mangga, nangka dan pisang, pada sektor peternakan produk unggulannya berupa sapi perah, sapi potong, kambing dan domba.

Dilihat dari kondisi geografisnya, Kabupaten Bangkalan terletak ditempat yang strategis yaitu menjadi pintu gerbang jembatan Suramadu (Surabaya-Madura) yang merupakan penghubung antara pulau madura dengan kota surabaya, selain itu terdapat pelabuhan Tanjung Perak. Pelabuhan Tanjung Perak merupakan salah satu pintu gerbang Indonesia, yang berfungsi sebagai kolektor dan distributor barang dari dan ke Kawasan Timur Indonesia, termasuk Jawa Timur. Karena letaknya yang strategis dan potensial maka Tanjung Perak juga merupakan Pusat Pelayaran Interinsular Kawasan Timur Indonesia dan merupakan pelabuhan tersibuk dan terbesar kedua se Indonesia setelah Pelabuhan Tanjung Priok di Jakarta.

Kabupaten Bangkalan memiliki potensi lain jika dilihat dari aspek lokasi. Berdasarkan teori lokasi, (Tarigan, 2005) menjelaskan bahwa salah satu unsur ruang adalah jarak. Jarak yang tidak jauh dengan beberapa kota besar disekitarnya merupakan keunggulan Kabupaten Bangkalan.

Berdasarkan letaknya yang strategis, Kabupaten Bangkalan berbatasan langsung dan merupakan gerbang keluar masuknya kendaraan yang akan melewati jembatan Suramadu (Surabaya-Madura) yang merupakan jembatan penghubung antara pulau madura dengan Kota Surabaya, dimana daerah tersebut merupakan pusat perdagangan dan bisnis terbesar di Jawa Timur.

Namun permasalahan yang dihadapi daerah tertinggal pada umumnya adalah belum optimalnya pengembangan potensi sumber daya lokal dalam perekonomian daerahnya. Hal ini dibuktikan dengan potensi yang dimiliki Kabupaten Bangkalan, yang masih menjadi kabupaten yang tertinggal. Oleh karena itu, kajian mengenai upaya pengembangan wilayah khususnya pengembangan wilayah bidang ekonomi melalui penentuan potensi ekonomi melalui spesifikasi sektor-sektor unggulan sangat diperlukan.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Sektor apa yang menjadi sektor basis untuk prioritas pengembangan di Kabupaten Bangkalan?
2. Sektor apa yang mendorong perekonomian di Kabupaten Bangkalan terhadap perekonomian di Jawa Timur?
3. Bagaimana kekuatan interaksi antara Kabupaten Bangkalan dengan Kota Surabaya, Kabupaten Bangkalan dengan Kabupaten Sampang?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Menentukan sektor basis untuk prioritas pengembangan pembangunan di Kabupaten Bangkalan.
2. Mengidentifikasi sektor potensial yang mendorong perekonomian di Kabupaten Bangkalan.
3. Menganalisis kekuatan interaksi antara Kabupaten Bangkalan dengan Kota Surabaya, Kabupaten Bangkalan dengan Kabupaten Sampang.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu :

1. Memudahkan pemerintah Kabupaten Bangkalan membuat rencana kebijakan pembangunan ekonomi daerah berdasarkan potensi ekonomi yang dimiliki Kabupaten Bangkalan.
2. Sebagai bahan informasi untuk pertimbangan oleh pemerintah Kabupaten Bangkalan tentang masing-masing sektor.
3. Menambah referensi tentang pertumbuhan ekonomi di suatu daerah untuk dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan studi-studi selanjutnya.